



RENCANA STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 – 2022



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**

Jl. H.R. Soebrantas Komplek Kantor Bupati Lama
Fax. (0762) 7327021 Bangkinang Kota
E-mail : bpbdkampar@yahoo.co.id
Web Site : <http://bpbd.kamparkab.go.id/pusdalopsb>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah suatu proses yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dalam menentukan sasaran dan strategi atau kegiatan untuk mencapainya. Serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya dalam mengoperasikan strategi.

Fungsi rencana strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk menghadapi potensi dan kompleksitas bencana di Kabupaten Kampar. Rencana strategis memuat perencanaan terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Didalam rencana strategis memuat isu-isu strategis kebencanaan di Kabupaten Kampar. Didalam rencana strategis juga memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun 2017-2022. Proses penyusunan perangkat daerah dengan mengacu kepada kegiatan-kegiatan lima tahun yang berlalu 2011-2016, kemudian mengalokasikan isu-isu strategis yang merupakan prioritas pada kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana Kabupaten Kampar untuk lima tahun yang akan datang (2017-2022).

Keterkaitan rencana strategis perangkat daerah dengan RPJMD dan dengan rencana kerja perangkat daerah. Didalam RPJMD Kabupaten Kampar, rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk 5 tahun, dimana penyusunannya berpedoman kepada RPJMD daerah dan bersifat indikatif yaitu memuat informasi baik sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun renstra. Karena sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan

Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana, yaitu meningkatkan perlindungan di daerah rawan bencana.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rujukan hukum yang melandasi penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 ini adalah sebagai berikut :

1. Pancasila sebagai Landasan Ideologis
2. Undang-undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional
3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42).
7. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
8. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014
9. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005 - 2025
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dimaksud untuk memberikan pedoman bagi terciptanya keterpaduan, kebersamaan, dan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, dan juga guna memberikan dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreatifitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kampar khususnya Bidang Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan uraian maksud diatas, maka tujuan dari penyusunan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar adalah :

1. Memberikan pedoman pada seluruh bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, yaitu Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam penentuan skala prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

2. Mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Bupati Kampar dalam Bidang Penanggulangan Bencana khususnya meningkatkan perlindungan di daerah rawan bencana.
3. Membangun sistem akuntabilitas terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar 2017-2022 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Meliputi uraian latar belakang penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi Uraian Mengenai Tugas, Fungsi Struktur Organisasi, Sumberdaya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan hal hal lain yang dianggap penting.

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berisi uraian mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan, Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar yang dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan yang lebih spesifik.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Uraian mengenai visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang dan menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Penjelasan mengenai indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, dengan harapan dapat berhasilnya pelaksanaan rencana yang telah terangkum dalam rencana strategis.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

I. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda Kabupaten Kampar selaku Ex Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Bab III pasal 4 Perda Nomor 7 Tahun 2010 Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok antara lain :

- Menetapkan Pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- Menyusun, dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang barang;
- Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar lahir sebagai bentuk pro-aktif Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap perubahan paradigma penanggulangan bencana dan kebijakan yang

telah ditetapkan, yaitu meninggalkan pola lama yang berfokus pada tanggap darurat menjadi upaya pemecahan persoalan dari sumber masalahnya serta membuat penanggulangan bencana menjadi bagian tak terpisahkan dari program pembangunan pemerintah, mengingat sebagian wilayah Kabupaten Kampar merupakan wilayah rawan bencana.

II. Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dan berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor : 52 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana teknis (UPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar ,mempunyai fungsi:

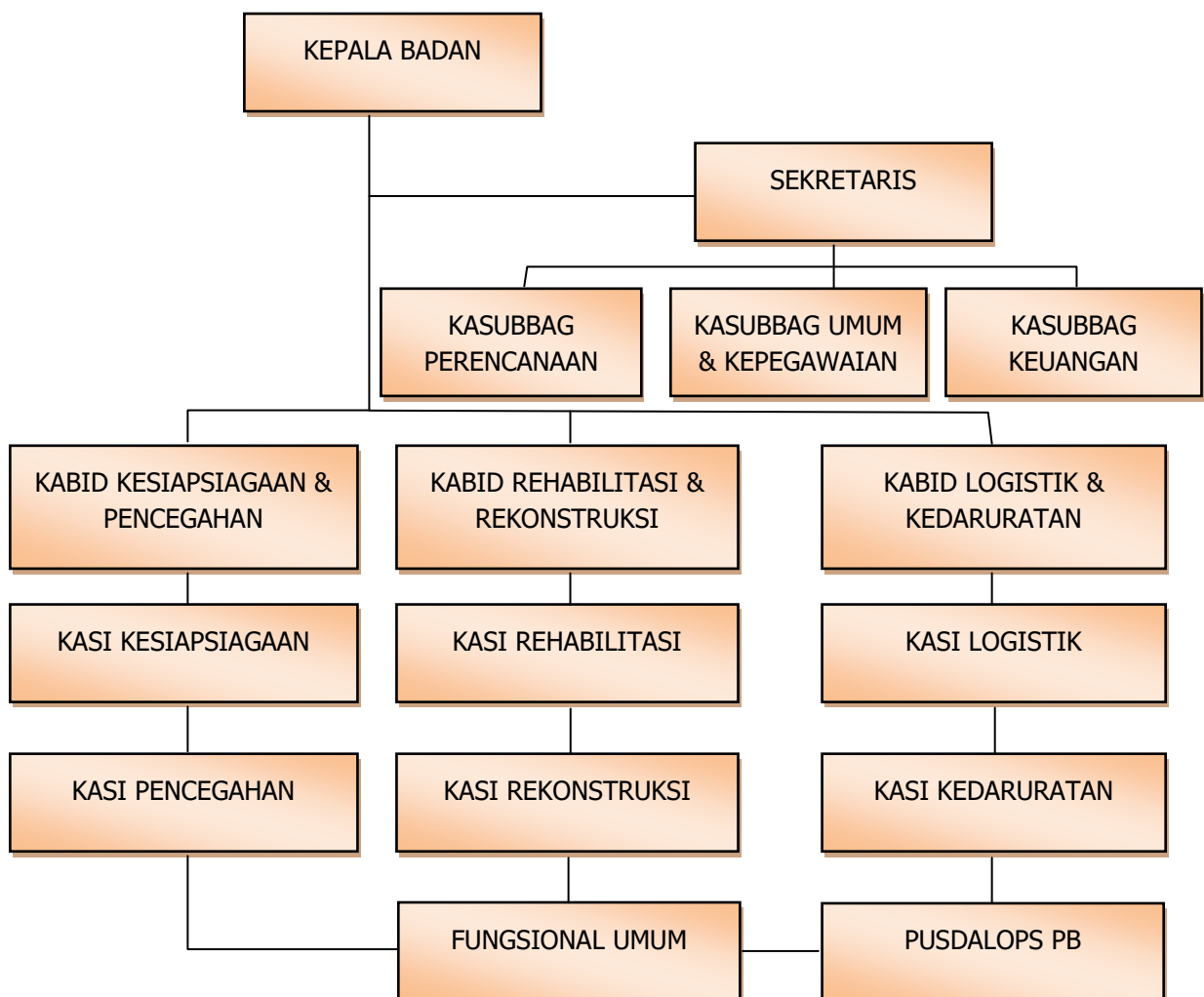
- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- Pelaksanaan program penanggulangan bencana kebakaran
- Pengkoordinasian dengan unsur terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran.

III. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Kepala Badan (Ex Officio Sekretaris Daerah).
2. Kepala Pelaksana
3. Sekretariat terdiri dari :
 - 3.1. Sub Bagian Perencanaan
 - 3.2. Sub Bagian Keuangan
 - 3.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - 4.1. Kepala Seksi Pencegahan
 - 4.2. Kepala Seksi Kesiapsiagaan

5. Bidang Kedaruratan dan Logistik yang terdiri dari :
 - 5.1. Kepala Seksi Kedaruratan
 - 5.2. Kepala Seksi Logistik
6. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi yang terdiri dari :
 - 6.1 Kepala Seksi Rehabilitasi
 - 6.2 Kepala Seksi Rekonstruksi
7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Damkar
 - 7.1 Kepala UPTB
 - 7.2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - 7.3 Petugas-petugas Operasional/kelompok fungsional



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

I. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian dan perlengkapan

1. Kepegawaian

Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Kampar Pada bulan Februari Tahun 2017 tercatat sebanyak 65 (Enam puluh lima) orang terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil : 43 Orang
- b. Tenaga Harian Lepas (THL) : 22 Orang

Secara terperinci kondisi sumber aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dapat digambarkan pada uraian sebagai berikut :

2. Tingkat Pendidikan Personil

Tingkat pendidikan personil/pegawai BPBD Kabupaten Kampar dapat digambarkan pada Tabel I berikut ini :

Tabel II.1
Kondisi Personil BPBD Kabupaten Kampar
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017

NO	TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL	PNS (Orang)	TKS (Orang)	JUMLAH (Orang)	PERSEN (%)
1.	S 2	4	-	4	6,15
2.	S 1	14	12	26	40,00
3.	Akademi/Sarjana Muda	2	-	2	3,08
4.	SMA/Sederajat	16	10	26	40,00
5.	SMP/Sederajat	4	-	4	6,15
6.	SD/Sederajat	3	-	3	4,62
	TOTAL	43	22	65	100,00

Dari Tabel I diatas dapat diketahui bahwa pegawai BPBD Kabupaten Kampar yang berpendidikan pasca sarjana (S2) sebanyak 4 orang atau 6,15%, yang berpendidikan Sarjana Strata Satu (S1) sebanyak 26 orang atau 40%, tamatan Diploma 3 sebanyak 2 orang atau 3,08, tamatan SMA/Sederajat sebanyak 26 orang atau 40%, dan tamatan SMP sebanyak 4

Orang atau 6,15 % dan tamatan SD sebanyak 3 orang atau 4,62 %. Jika dilihat dari keseluruhan pendidikan pegawai sebanyak 65 orang atau 40% berasal dari tamatan perguruan tinggi (S1) dan SMA.

2. Pangkat/golongan personil

Kondisi kepangkatan/golongan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar posisi Desember 2017 dapat digambarkan pada Tabel I.2 berikut ini :

Tabel II.2
Kondisi Pegawai BPBD Kabupaten Kampar
Menurut Pangkat/golongan Awal Tahun 2017

NO	GOLONGAN/ PANGKAT	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE (%)
1	Pembina Utama Muda	1	1,54
2	Pembina Tk. I	1	1,54
3	Pembina	8	12,31
4	Penata Tk. I	7	10,77
5	Penata	6	9,23
6	Penata muda Tk. I	2	3,08
7	Penata Muda	2	3,08
8	Pengatur Tk. I	1	1,54
9	Pengatur	5	7,69
10	Pengatur Muda Tk. I	3	4,62
11	Pengatur Muda	1	1,54
12	Juru Tk I	1	1,54
13	Juru	2	3,08
14	Juru Muda Tk. I	1	1,54
15	Juru Muda	2	3,08
16	Tenaga Harian Lepas (Non PNS)	22	33,85
	TOTAL	65	100,00

Dilihat dari golongan/ kepangkatan, bahwa golongan terbanyak pada BPBD Kabupaten Kampar adalah golongan IV sebanyak 8 orang atau 12,31 %, pegawai golongan III sebanyak 7 orang atau 10,77 % pegawai golongan II sebanyak 5 orang atau 7,69 %, Golongan I.c dan I.a sebanyak 2 orang atau 3,08 % dan non golongan/Non PNS (THL) sebanyak 22 orang atau 33,85%

3. Pendidikan dan Latihan Penjenjangan

Pendidikan dan latihan (diklat) penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai BPBD Kabupaten Kampar posisi Desember 2017, dapat digambarkan pada tabel I.3 dibawah ini :

Tabel II.3
Kondisi Pegawai BPBD Kabupaten Kampar Menurut
Diklat Penjenjangan Desember 2017

NO	JENIS DIKLAT STRUKTURAL	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE (%)
1.	SPAMEN	1	2,33
2.	SPAMA (DIKLAT PIM III)	7	16,28
3.	ADUMLA (DIKLATPIM IV)	3	6,98
4.	ADUM/SPADA	6	13,95
	TOTAL	17	13,95

Dari 43 orang jumlah pegawai pada BPBD Kabupaten Kampar yang telah mengikuti pendidikan dan latihan penjenjangan adalah sebanyak 17 orang atau 13,95 % dari jumlah 43 orang pegawai tersebut, yang mana sebanyak 7 orang atau (16,28%) telah mengikuti diklat Spama (diklat pim III), sebanyak 3 orang atau (6,98%) yang telah mengikuti diklat Adumla (Diklat pim IV) dan sebanyak 6 orang telah mengikuti diklat Adum/Spada (13,95%).

4. Pendidikan Teknis Fungsional

Pendidikan teknis fungsional yang diikuti oleh Pegawai BPBD Kabupten Kampar posisi Desember 2017, dapat digambarkan pada tabel I.4 dibawah ini :

Tabel I. 4. Kondisi Personil BPBD Kabupaten Kampar
Menurut Pendidikan teknis Fungsional Pada Desember Tahun 2017

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE (%)
1.	Kursus Manajemen Proyek	5	26,31
2.	Kursus Bendaharawan	4	21,05
3.	Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	2	10,52
4.	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	8	42,10
	TOTAL	19	100

Dari data diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 19 orang atau 100 % dari total pegawai BPBD kabupaten Kampar yang telah mengikuti pendidikan dan latihan teknis fungsional. Dari Jumlah 19 orang tersebut hanya 5 orang atau 26,31% yang mengikuti pendidikan kursus bendaharawan Proyek, 4 orang atau 21,05 %, yang sudah mempunyai sertifikasi barang dan jasa sebanyak 2 orang atau 10,52 % ,mengikuti KursusPengadaan Barang dan jasa sebanyak 8 orang atau 42,10 % Apabila mengacu kepada tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Kampar dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Maka Jumlah yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Teknis fungsional dimaksud masih sangat sedikit sekali.

II. Asset/ Modal

1. Gedung / Ruangan

Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar beralamat di Jalan HR. Soebrantas Komplek Kantor Bupati Lama Bangkinang Kota Kode Pos: 28412.

Tabel II. 5 Daftar Barang Inventaris / Perlengkapan BPBD Kabupaten Kampar

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	5
1	Bangunan Kantor Permanen	1	1	-	
2	Computer PC lengkap	6	6	-	
3	Computer portable (Lap Top)	8	8	-	
4	Printer Laser	4	4	-	
5	Printer Epson Dot Metrik Besar	1	1	-	
6	Printer Epson Dot Metrik Kecil	1	1	-	
7	Camera	3	3	-	
8	Handy Cam	1	1	-	
9	Invokus/Proyeksi	1	1	-	
10	Wireless	1	1	-	
11	Brankas	1	1	-	
12	Lemari Arsip (Sleding)	8	8	-	
13	Filling Kabinet	10	10	-	
14	Kursi Tamu	2	2	-	
15	Meja Tamu	2	2	-	
16	Kursi Hadap	15	15	-	
17	Tenda Posko	1	1	-	

18	Tenda Pleton	2	2	-	
19	Tenda Regu	3	3	-	
20	Velbed	20	20	-	
21	Radio Rig Lengkap	1	1	-	
22	Radio HT	4	4	-	
23	SSB Lengkap	1	1	-	
24	Perahu Keretkap, 10 Orang	1	1	-	
24	Perahu Karetkap 12 Orang	1	1	-	
25	Mesin Perahu Karet 30 PK	1	1	-	
26	Sound Syistem	1	1	-	
27	Mobil Dapur Lapangan	1	1	-	
28	Mobuil Resque Komando	1	1	-	
29	Motor Trail	2	2	-	
30	Perahu karet kapasiras 10 orang	1	1	-	
31	Mesin Perahu Karet kapasitas 18 PK	1	1	-	
32	Tenda Pleton	2	2	-	
33	Tenda Regu	3	3	-	
34	Tenda Keluarga	5	5	-	
35	Velbed	10	10	-	
36	H T	2	2	-	
37	R I G	1	1	-	
38	S S B	1	1	-	
39	Lampu senter HID Searchlight	1	1	-	
40	Genset 5 KVA	2	2	-	
41	Water Tretment Portable	1	1	-	
42	Laptop Toshiba	2	2	-	
43	Keyboard	3	3	-	
44	Komputer PC	2	2	-	
45	CPU	3	2	-	
46	Monitor	3	3	-	
47	Mouse	4	4	-	
48	Speaker Kecil	4	4	-	
49	Camera Nikon	1	1	-	
50	Printer Laser Multi Fungsi A4 HP	1	1	-	
51	OFFICEJET	2	2	-	
52	Printer A3 DISJET PIXMA 1X-6560	2	2	-	
53	Sound System	3	3	-	
54	Komputer PC Lenopo	1	1	-	
55	Laptop Sony	2	2	-	
56	Laptop Toshiba	1	1	-	
57	Komputer Note Book	1	1	-	
58	Printer Canon	1	1	-	
59	Kamera Canon	1	1	-	
60	Air Condicioner LG	1	1	-	
61	Valcum Clener	1	1	-	
62	Mesin Photocopy Bevinbo 421	1	1	-	
63	Mesin Faximile Panasonic	1	1	-	
64	Kulkas LG	1	1	-	

65	LCD TV 32 Sony	2	2	-	
66	Parabola Dish Parabola 8 Feed	1	1	-	
67	Recyper Targta UCD 2342	2	2	-	
68	GPS	2	2	-	
69	Papan DUK	1	1	-	
70	Papan Baliho	1	1	-	
71	Mobil Double Cabin Ford	1	1	-	
72	Sepeda Motor New Supra X	1	1	-	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Peran BPBD Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana tidak secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari OPD lain dalam penanggulangan bencananya. Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Perda Kabupaten Kampar Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 08 November 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar. Maka BPBD Kabupaten Kampar mempunyai 3 (tiga) fungsi utama PB yaitu pelaksanaan, koordinasi dan komando.

- a. Sebagai pelaksana, BPBD Kabupaten Kampar memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.
- b. BPBD berfungsi sebagai *leading sector* dan mengkoordinasikan dengan OPD teknis, seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Perumahan dan Pemukiman dan yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis. BPBD mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pasca bencana yang dilakukan oleh OPD teknis. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing OPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling menunjang.
- c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai *incider commander*, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan OPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera.

Perlu diingat bahwa pendanaan PB tidak hanya berasal dan dikelola oleh BNPB, BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota namun pendanaa PB juga melekat pada kementerian/Lembaga teknis, OPD teknis terkait kebencanaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi terutama BPBD Kabupaten Kampar mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana.

Kabupaten Kampar memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh factor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kampar berada dalam ancaman bencana, antara lain banjir, kebakaran lahan dan hutan, tanah longsor, angin putting beliung, kekeringan dan konflik sosial. Dengan adanya jenis ancaman bencana yang beragam, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Pemerintah daerah Kabupaten Kampar perlu melibatkan semua pihak yang terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu penataan dan perencanaan matang agar tercipta suatu sistem penanggulangan bencana secara terarah dan terpadu.

Tabel II.7
Potensi Bencana Kabupaten Kampar

Potensi Bencana Kabupaten Kampar Berdasarkan Catatan Sejarah	
1. Banjir	5. Epidemi
2. Kebakaran Hutan dan Lahan	6. Konflik Sosial
3. Tanah Longsor/Gerakan Tanah	7. Kegagalan Teknologi
4. Kekeringan	8. Angin Puting Beliung

BPBD Kabupaten Kampar telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan pengurangan risiko bencana periode 2017 – 2022 antara lain adalah :

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah untuk meningkatnya upaya Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana. Kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Sosialisasi penanganan bencana banjir
- b. Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana
- c. Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- d. Pembuatan Leaflet Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.
- e. Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah
- f. Pembentukan dan Pengembangan Desa Siaga Bencana
- g. Evaluasi dan Monitoring Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- h. Sosialisasi Penanganan Bencana Banjir

2. Penanganan Darurat dan Logistik

Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Penyelamatan dan Evakuasi Terhadap Korban Bencana, Penanganan Pengungsi dan Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital untuk Aktivitas masyarakat. Kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Bimtek SAR dan Latgab Penyelamatan, Evakuasi Penanganan Pengungsi setiap tahun;
- b. Operasional Darurat dan Logistik
- c. Penyusunan Standarisasi Operasional Pedoman (SOP) Penanganan Darurat
- d. Evaluasi dan Monitoring Bidang Darurat dan Logistik
- e. Koordinasi dan fasilitasi Pemberi Bantuan Bencana Banjir
- f. Fasilitasi dan koordinasi Teknis Darurat Bencana
- g. Operasional Satgas Penanggulangan dan Penanganan Bencana
- h. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Relawan setiap tahun
- i. Pengadaan logistik saat tanggap darurat
- j. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Kebencanaan
- k. Pelatihan Peralatan Bencana

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a. Fasilitas pelayanan pemulihan dan pembangkitan kondisi Wilayah Pasca Bencana
- b. Koordinasi dan Fasilitas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- c. Pengkajian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana
- d. Fasilitas dan Koordinasi Penanganan Infrastruktur Pasca Bencana
- e. Evaluasi dan Pemantauan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- f. Fasilitas dan Koordinasi Penanggulangan Banjir, Kebakaran Lahan dan Hutan dan Angin Putting beliung serta Tanah Longsor.
- g. Pelatihan Teknis Penilaian Damage dan Losses Assesment
- h. Fasilitas dan Koordinasi Penerapan Rancang Bangun dan Peralatan yang tepat dan Aman Bencana
- i. Fasilitas dan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam Rangka Penanganan Pasca Bencana
- j. Perbaikan Lingkungan Wilayah Pasca Bencana
- k. Perbaikan Rumah Masyarakat Korban Bencana

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2012-2016 (Terlampir)

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pelayanan BPBD Kabupaten Kampar Tahun 2012-2016 (Renstra Periode yang Lalu) (Terlampir)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan Pelayanan BPBD :

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar adalah :

- a. Letak geografis dan topografi yang potensial terhadap terjadinya bencana alam dan luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam terdapat 8 (delapan) jenis bencana di wilayah Kabupaten Kampar, yaitu banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor/gerakan tanah, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, kegagalan teknologi dan angin puting beliung;

- b. Terjadinya anomaly cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (global warning);
- c. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat

Faktor Lingkungan Eksternal

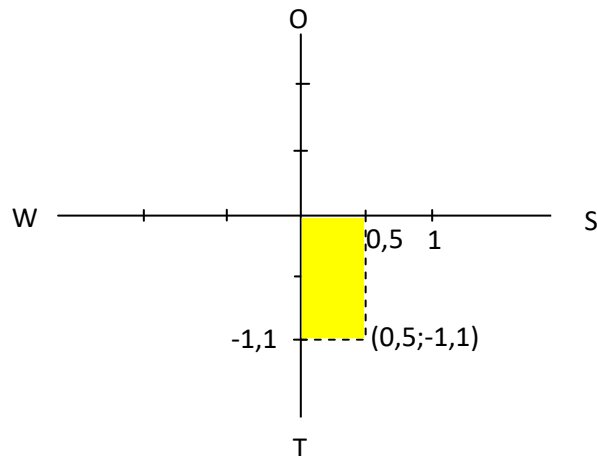
A. Peluang

Nomor	Peluang	Skor
1	Adanya komitmen pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0,5
2	Adanya keterlibatan dunia usaha dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.	0,2
3	Adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan dalam Penanggulangan Bencana	0,5
4	Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di Bidang Kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko-resiko bencana	0,5
5	Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana antara TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah.	0,5
	Jumlah	2,2

B. Ancaman

Nomor	Ancaman	Skor
1	Belum sepenuhnya penanganan bencana di Kabupaten Kampar dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010	0,5
2	Terbatasnya anggaran yang disediakan bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar	0,5
3	Terdapat 7 jenis bencana di Kabupaten Kampar	0,5
4	Tingkat ancaman bencana dalam kategori tinggi untuk Kabupaten Kampar	1,5
5	Dampak kerusakan infrastruktur akibat bencana kategori tinggi	0,5
6	Dampak kerugian material dan ekonomi akibat bencana	0,6
7	Korban jiwa akibat bencana	0,3
	Jumlah	3,3

$$\begin{aligned}
 \text{Kekuatan} - \text{kelemahan} &= 2,5 - 2 \\
 &= 0,5 \quad (x) \\
 \text{Peluang} - \text{Ancaman} &= 2,2 - 3,3 \\
 &= -1,1 \quad (y)
 \end{aligned}$$



	X	Kekuatan	kelemahan
Peluang	Y		
Ancaman			

2.4.2. Peluang

Meskipun tantangan yang harus dihadapi cukup banyak, namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan pelayanan BPBD Kabupaten Kampar:

- Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
- Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa);

- c. Adanya peran serta masyarakat, ormas dan LSM dalam penanggulangan bencana;
- d. Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi;
- e. Pengembangan kapasitas secara efektif dalam penanggulangan bencana
- f. Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana;
- g. Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif;
- h. Kepedulian lintas sector dan OPD lainnya untuk mengalokasikan dalam program-program kebencanaan.

Faktor Lingkungan Internal

Tabel kekuatan

1. Kekuatan

Nomor	Kekuatan	Skor
1	Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0,4
2	Terbentuknya kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dipimpin oleh Sekda selaku Ex. Officio	0,2
3	Ditetapkannya penanggulangan bencana sebagai prioritas nomor 5 dalam RPJMD	0,2
4	Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 08 November 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar	0,7
5	Tersedianya Aparatur Sipil Negara	0,2
6	Tersedianya gedung perkantoran	0,3
7	Tersedianya sarana dan prasarana	0,3
8	Tersedianya dana dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar	0,2
	Jumlah	2,5

2. Kelemahan

Nomor	Kelemahan	Skor
1	Belum memadainya Peraturan Daerah/aturan yang dimiliki sebagai pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar	0,3
2	Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka Penanggulangan Bencana	0,5
3	Kurang tercapainya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan masih berjalan secara sektoral	0,2
4	Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana	0,5
5	Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (kendaraan pendukung)	0,5
	Jumlah	2

Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan dipublikasikan pada Bulan Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2016 di Manado adalah :

Beberapa prioritas yang bisa dilakukan untuk menentukan indeks Risiko Bencana Daerah, antara lain :

Prioritas I

Memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang efektif untuk membangun ketangguhan di daerah. Regulasi atau payung hukum yang harus dimiliki antara lain.

1. Memiliki Perda Penanggulangan Bencana
2. Memiliki Perda Penanggulangan Bencana Daerah
3. Memiliki Perda Forum Pengurangan Risiko Bencana
4. Memiliki Aturan Penyebaran Informasi Kebencanaan
5. Memiliki Perda Rencana Penanggulangan Bencana
6. Memiliki Perda Tata Ruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana

Prioritas II

Membangun proses perencanaan yang terpadu mempertimbangkan Kajian Risiko Bencana, yaitu :

1. Memiliki kajian risiko bencana dan visualisasi spasial untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Memiliki Rencana Penanggulangan Bencana berbasis kajian Risiko yang diutamakan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Prioritas III

Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan efektif, yaitu :

1. Memiliki sistem informasi yang menjangkau langsung masyarakat.
2. Memiliki sistem informasi yang terintegrasi antar tingkat pemerintah dari nasional sampai lokal.

Prioritas IV

Mencukupi kualitas dan kualitas logistik daerah dalam mengantisipasi bencana, yaitu:

1. Memiliki pemahaman kebutuhan logistik daerah untuk setiap ancaman bencana.
2. Pengelolaan logistik dengan melaksanakan efektif dan efisien.
3. Tersedianya pemenuhan kebutuhan hidup di masa darurat.

Prioritas V

Meningkatkan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana yaitu :

1. Kemampuan memberdayakan masyarakat dalam membangun ketangguhan desa terhadap bencana.
2. Memperkuat penegakan hukum dan optimalisasi kebijakan.
3. Melakukan restorasi dan konservasi sumber daya alam.

Prioritas VI

Memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana yaitu :

1. Menyiapkan rencana cadangan setiap ancaman bencana.
2. Membangun sistem peringatan dini hulu ke hilir.

Prioritas VII

Mengembangkan sistem pemulihan bencana, yaitu :

1. Membangun infrastruktur penting
2. Membangun pemukiman/rumah penduduk
3. Membangun penghidupan masyarakat

Penjabaran dari analisis Swot

Posisi kondisi kebencanaan di Kabupaten Kampar berada pada posisi siaga, karena koordinat x terbentuk dari sector kekuatan dengan kelemahan yang bertanda positif berarti unsur kekuatan masih mendominasi. Sedangkan koordinat yang bernilai negatif diperoleh dari selisih peluang dengan ancaman. Sehingga untuk mengurangi indeks resiko bencana di Kabupaten Kampar, pemerintah daerah harus melakukan langkah-langkah untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, sumber daya dari dunia usaha, serta peningkatan kapasitas masyarakat tahan bencana dan pemanfaatan sumberdaya dari masyarakat.

Bentuk-bentuk penguatan yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Bupati Kampar agar mengadakan komitmen yang jelas dan tegas dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di bidang mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, bantuan logistic serta peralatan, dan alokasi dana siap pakai untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Kampar, agar secara persuasive maupun kebijakan untuk dapat meningkatkan peran serta dunia usaha untuk memberikan dukungan logistic dan peralatan dalam program pengurangan Risiko Bencana dan Tanggap Darurat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar perlu mengalokasikan dana guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan potensi bencana, serta memiliki kemauan untuk membangun masyarakat tangguh bencana.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu mendapat dukungan dana untuk mengoptimalkan fungsi teknologi informatika guna membangun system kebencanaan yang terintegrasi dan efektif, menjangkau langsung ke masyarakat, mampu merespon informasi secara efektif, dan terintegrasi sejak dari pemerintah pusat, provinsi daerah dan lokal.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar agar mengalokasikan dana Rapat Koordinasi agar Sekretaris Daerah selaku Ex Officio BPBD Kampar dapat

melaksanakan koordinasi secara intensif, terencana, dan terpadu bersama TNI, POLRI, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk menghadapi kegiatan bencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya telah menimbulkan perubahan mendasar terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain :

- 1) Adanya payung hukum, mandat bagi perlindungan rakyat dari risiko bencana;
- 2) Perubahan cara pandang dari responsif menjadi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan;
- 3) Terintegrasinya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan;
- 4) Penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah;
- 5) Konsekuensi logis untuk membentuk kelembagaan yang kuat dan semesta;
- 6) Mengatur tentang hak dan kewajiban rakyat, serta keterlibatan berbagai pihak sebagai penyelenggara penanggulangan bencana.

Salah satu yang dirumuskan berdasarkan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana adalah adanya sistem penanggulangan bencana yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain :

- 1) Komponen legislasi mencakup dasar-dasar kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana beserta turunan-turunannya dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kota/kabupaten.
- 2) Komponen kelembagaan terkait dengan kedudukan, struktur, tugas pokok, fungsi dan wewenang badan penanggulangan dari tingkat Nasional, Provinsi sampai dengan Kota/Kabupaten.
- 3) Komponen perencanaan terkait dengan program-program penanggulangan bencana dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kota/kabupaten.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu 'mainstream' dalam perencanaan pembangunan. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana sebagai 'perspektif' dalam perencanaan;

- 4) Komponen pendanaan, terkait dengan penganggaran dari tingkat nasional, provinsi dan kota/kabupaten. Untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana, sumber dana bisa berasal dari berbagai sumber, dengan tetap memegang prinsip untuk tidak mempergunakan dana-dana yang bisa menimbulkan kerentanan baru, misalnya dana pinjaman luar negeri, dan dari perusahaan yang mempunyai kontribusi merusak lingkungan. Di sisi lain pendanaan untuk program ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
- 5) Pengembangan kapasitas disemua komponen penyelenggara penanggulangan bencana baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam semua fase baik prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana merupakan “urusan bersama”, semua sektor/lini, dan tiap-tiap komponen dalam sistem penanggulangan bencana memiliki kontribusi yang sama pentingnya terhadap kesuksesan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, tanggung jawab dan kewenangan BPBD Kabupaten Kampar adalah dalam kegiatan strategis penanggulangan bencana dijabarkan sebagai berikut :

- a) Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pasca bencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan.
- b) Dalam kondisi tanggap darurat, BPBD menjalankan fungsi komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari BPBD dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

- c) Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2010, BPBD Kabupaten Kampar pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Kabupaten Kampar maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Kabupaten Kampar harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Kabupaten Kampar jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Kabupaten Kampar yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

- a. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana;
- b. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Kampar;
- c. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk menyimpan logistik dan peralatan bencana;
- d. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;

- e. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Kampar;
- f. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar;
- g. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Kampar;
- h. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar;
- i. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Kampar;
- j. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar,
- k. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pembangunan Kabupaten Kampar yang akan diwujudkan pada tahun 2025 adalah "***Mewujudkan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya dalam masyarakat Agamis Tahun 2025***", sedangkan visi Bupati Kampar tahun 2017-2022 adalah "***Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera***".

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Kampar untuk mewujudkan visi sebagai berikut :

➤ **Misi Pertama :**

Menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan professional ;

Penyiapan Sumber Daya Manusia diantaranya dilakukan pada calon angkatan kerja baik saat masih mengenyam dunia pendidikan sampai pada tahap menjadi pencari kerja. Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya dapat bersaing di dunia usaha, namun juga dapat terintegrasi dengan kebutuhan daerah melalui visi yang diarahkan oleh kepala daerah. Integrasi ini penting terutama dalam mengarahkan segala potensi sumber daya daerah menuju pada arah pembangunan yang sama. Maka selain potensi daerah yang dikuatkan oleh kapasitas sumber daya manusia di level pendidikan dan penyiapan tenaga kerja, aparatur pemerintah daerah pun dituntut memiliki kapasitas yang mengarah pada semangat profesionalisme.

➤ **Misi Kedua :**

Mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;

Pengembangan pertanian yang modern adalah mengembangkan seluruh aktivitas pertanian dari hulu sampai hilir, melalui penerapan teknologi yang sesuai kebutuhan dan kondisi daerah. Selain itu, upaya pengembangan

pertanian juga berupa kemudahan akses kebutuhan pertanian (modal, sarana, prasarana dll) bagi petani serta memberikan nilai tambah dari proses pengolahan hasil yang diperolehnya.

➤ **Misi Ketiga :**

Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional;

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kampar utamanya diupayakan dalam menjawab permasalahan aksesibilitas dalam mengembangkan kawasan permukiman yang nyaman dan memadai. Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan dimana dari seluruh kecamatan tersebut belum memiliki aksesibilitas yang baik dari sisi infrastruktur jalan dan cakupan telekomunikasi. Hal tersebut berpengaruh pada aktifitas dan produktifitas masyarakat sehingga secara tidak langsung mempengaruhi capaian pembangunan daerah secara keseluruhan.

➤ **Misi Keempat :**

Menciptakan iklim usaha yang kondusif ;

Terciptanya iklim usaha yang kondusif menjadi prasyarat dalam pengembangan ekonomi, khususnya dunia usaha. Besarnya peluang untuk melakukan investasi di Kabupaten Kampar akan menjadi kurang bermakna jika tidak ditunjang oleh regulasi dan program yang juga focus dalam pengembangan investasi.

➤ **Misi Kelima :**

Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju ;

Saat Kabupaten Kampar belum dapat menjadi tujuan wisata bagi tidak hanya para wisatawan domestic namun juga para wisatawan lokal Kabupaten Kampar sendiri. Padahal dari keberadaan objek wisata, Kabupaten Kampar memiliki berbagai objek wisata baik dari wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan lain.

➤ **Misi Keenam**

Memperkuat citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang religius, Beradat, dan Berbudaya.

Kabupaten Kampar memiliki sejarah dan budaya yang sangat kuat ditandai dengan peninggalan fisik seperti candi dan masjid yang telah berdiri ratusan tahun yang lalu sampai pada nilai-nilai budaya yang telah menjadi tradisi keseharian. Kebanggaan terhadap kekayaan budaya yang dimiliki seharusnya juga dapat mewujudkan pada kemajuan daerah. Namun perkembangan Kabupaten Kampar yang dipengaruhi juga dengan daerah lain sehingga saat ini membuat budaya asli Kampar semakin terdegradasi.

Untuk menunjang visi dan misi tersebut terdapat 4 (empat) program yang dipersiapkan untuk mencapai misi kesatu yaitu program :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Kesiapsiagaan
3. Program Bidang Kedaruratan dan Logistik
4. Program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Penanggulangan Bencana daerah. mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- b. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- c. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- e. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- h. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ;
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Riau telah diatur dalam Peraturan Daerah, tentang Organisasi dan Tata Kerja Struktur Organisasi BPBD Propinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kampar 2017-2022), prioritas pembangunan Kabupaten Kampar diarahkan sukseskan program 3i, adapun program 3i melalui 5R dimaksud adalah :

Program 3i :

1. Infrastruktur
2. Industri
3. Investasi

Melalui 5R :

- Rapi
- Resik
- Rajin
- Rawat
- Ringkas

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

yang selektif, efektif dan efisien, b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi: pengembangan kawasan-kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan

strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan.

Luasnya wilayah kabupaten Kampar dan merupakan daerah yang langsung berbatasan dengan ibukota Propinsi Riau maka hal ini menimbulkan peluang ekonomi sekaligus menimbulkan ancaman akan kamtibmas, oleh karena itu diperlukan kewaspadaan dini masyarakat terhadap gangguan dan ancaman yang akan terjadi untuk menjaga ketahanan bangsa dan kesatuan bangsa.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Berdasarkan analisis tersebut diatas, dalam merumuskan strategis perlu mempertimbangkan factor lingkungan yakni kondisi situasi, keadaan peristiwa yang menjadi isu strategis yang dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran organisasi. Adapun isu-isu bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar adalah :

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra BPBD Kabupaten Kampar tahun 2017-2022, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh BPBD Kabupaten Kampar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparatur kebencanaan.
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat kebencanaan.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efesiensi.
2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam kondisi siaga bencana dan tanggap darurat bencana dilaksanakan dengan arah kebijakan :

- a. Membangun kemampuan dan kolektafitas masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penanggulangan bencana
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penanggulangan bencana
 - c. Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan kelembagaan non pemerintah.
- 3. Strategi Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kebencanaan pada saat pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
- 4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya terwujudnya visi dan misi Kabupaten Kampar dan BPBD Kabupaten Kampar.
 - b. Melaksanakan penanggulangan bencana yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar SKPD.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Visi

Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar maka ditetapkan "Visi" sebagai berikut :

**"TANGGAP, TANGGUH, TERAMPIL DAN TUNTAS DALAM MENANGGULANGI
BENCANA"**

Tanggap adalah memiliki kepedulian yang tinggi dalam penanggulangan bencana.

Tangguh adalah memiliki kemampuan yang dapat dipercaya dalam menghadapi bencana serta memiliki kemampuan dan kepekaan didalam pengendalian bencana .

Terampil adalah memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan standar yang dimiliki dalam penanggulangan bencana.

Tuntas adalah melaksanakan upaya-upaya pemulihan dengan baik, terencana, terkoordinasi, menyeluruh terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana yang terjadi.

4.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sejalan dengan VISI Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar maka misi dituangkan dalam pernyataan :

1. Memperkuat kapasitas aparatur dan lembaga dalam penanggulangan bencana
2. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana
3. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal

4. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
5. Menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat, tepat dan komprehensif.

4.2. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi dan Misi hanya dapat direalisasikan jika dirumuskan terlebih dahulu kedalam bentuk yang lebih nyata dan terarah, berupa tujuan dan sasaran. Tujuan ditetapkan berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan, yang berarti organisasi telah memperhitungkan kekuatan dan kelemahan serta segala sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan, serta merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu sampai dengan lima tahun.

Sedangkan sasaran jangka pendek Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar merupakan penjabaran pencapaian tujuan, yaitu target-target yang akan dicapai dalam waktu satu tahun.

4.2.1 Tujuan

Optimalisasi Penanggulangan Bencana antara lain :

1. Mengembangkan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
2. Mendorong semangat kemandirian, kegotong royongan dan kebersamaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
3. Mewujudkan regulasi yang lengkap dalam penanggulangan bencana
4. Mensinkronisasikan penanggulangan resiko bencana dalam program pembangunan daerah
5. Membangun kemitraan dengan stakeholder dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana.

4.2.2 Sasaran

- Terciptanya SDM dan sarana dan prasarana Program Penanggulangan Bencana
- Terkoordinasinya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana:
 1. Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana
 2. Mewujudkan program dan kegiatan kebencanaan yang tepat sasaran dalam PRB yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah
 3. Menyediakan regulasi penanggulangan bencana yang komprehensif
 4. Mewujudkan komunitas masyarakat peduli bencana
 5. Membina kerjasama pemerintah, tokoh masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana
 6. Meningkatkan Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana
 7. Meningkatkan partisipasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
 8. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengembangkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana
- Terlaksananya dan terintegrasinya penanganan tanggap darurat bencana adalah dengan meningkatkan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penanganan pengungsi yang optimal.
- Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah dengan meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perencanaan.

Tabel. VI. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan perlindungan di daerah rawan bencana	Tersediannya landasan hukum dalam Penanggulangan Bencana	- Jumlah regulasi perda yang disusun - Jumlah dokumen rencana aksi daerah yang disusun - Meningkatnya pengetahuan pegawai tentang kebencanaan - Jumlah dokumen disaster manajemen plan - Jumlah dokumen bencana Kabupaten Kampar dalam angka (BKDA) - Jumlah dokumen pengendalian evaluasi dan pelaporan - Tersedianya 1 pusat informasi penanggulangan bencana - Jumlah dokumen rencana kontinjensi - Jumlah dokumen laporan monev - Jumlah orientasi aparatur dalam penanggulangan bencana - Jumlah kegiatan penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana (RAD-PB) - Terlaksananya kegiatan studi di bidang kebencanaan - Jumlah dilaksanakannya PRB - Jumlah kegiatan informasi kebencanaan terbaru - Jumlah kegiatan perencanaan strategis penanggulangan bencana - Jumlah publikasi dan kehumasan BPBD	2 Dok 1 Dok 5 Org - 1 Dok 1 Dok - 1 Dok 1 Kali - 1 Kali 1 Kali - 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Thn 1 Dok	2 Dok 1 Dok 5 Org - 1 Dok 1 Dok 1 Unit 1 Dok 1 Dok 1 Kali - 1 Kali 1 Kali - 1 Kali 1 Kali - 1 Thn -	2 Dok 1 Dok 5 Org 1 Dok 1 Dok - 1 Dok 1 Kali 1 Keg - 1 Kali 1 Kali 1 Keg 1 Thn 1 Dok	2 Dok 1 Dok 5 Org - 1 Dok 1 Dok - 1 Dok 1 Kali - 1 Kali 1 Kali - 1 Kali 1 Kali - 1 Thn -	2 Dok 1 Dok 5 Org 1 Dok 1 Dok - 1 Dok 1 Kali - 1 Kali 1 Kali 1 Keg - 1 Kali 1 Kali 1 Keg 1 Thn 1 Dok

			- Jumlah perencanaan teknis pendampingan bantuan dan koordinasi perbaikan sarana dan prasarana umum pasca bencana					
	Meningkatkan perlindungan di daerah rawan bencana	Terdiseminasikannya informasi publik wilayah-wilayah rawan bencana yang mudah diakses	- Jumlah system informasi manajemen pada 5 kecamatan - Jumlah rambu-rambu peringatan dini kebencanaan - Jumlah relawan bencana pada daerah rawan bencana Kabupaten Kampar - Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan terhadap ancaman bencana di Kabupaten Kampar - Jumlah up-date peta kebencanaan - Jumlah relawan bencana pada daerah rawan bencana secara berkesinambungan - Jumlah desa tangguh bencana - Jumlah rapat teknis kebencanaan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat - Jumlah alat system peringatan dini bencana banjir - Tersebarannya informasi kebencanaan - Jumlah apel kesiapsiagaan aparaturnya dalam penanggulangan bencana - Terselenggaranya pendidikan sekolah sungai aman bencana - Jumlah pengetahuan dan keterampilan anak sekolah akan bahaya bencana - Meningkatnya orang akan pentingnya kesiapsiagaan terhadap ancaman	1 Sistem 80 Buah 180 Relawan 650 Org 60 Org 60 Org 1 Desa 1 Kali 2 Unit 15 Baliho 1 Kali 1 Sekolah 1000 Org 800 org	1 Sistem 80 Buah 180 Relawan 650 Org 60 Org 60 Org 1 Desa 1 Kali 2 Unit 15 Baliho 1 Kali 15 Baliho 1000 Org 800 org	1 Sistem 80 Buah 190 Relawan 650 Org 60 Org 60 Org 1 Desa 1 Kali 2 Unit 15 Baliho 1 Kali 15 Baliho 1000 Org 800 org	1 Sistem 80 Buah 190 Relawan 650 Org 60 Org 60 Org 1 Desa 1 Kali 2 Unit 15 Baliho 1 Kali 15 Baliho 1000 Org 800 org	1 Sistem 80 Buah 190 Relawan 700 Org 60 Org 60 Org 1 Desa 1 Kali 2 Unit 15 Baliho 1 Kali 15 Baliho 1000 Org 800 org

			bencana di Kabupaten Kampar - Jumlah dokumen kearifan lokal pengurangan risiko bencana - Jumlah nota kesepahaman pengembangan CSR untuk daerah bencana - Jumlah gladi lapangan penanggulangan bencana - Jumlah operasional piket rutin siaga bencana	1 Dok 1 Nota - 1 Keg	1 Dok 1 Nota 1 Kali 1 Keg	1 Dok 1 Nota - 1 Keg	1 Dok 1 Nota 1 Kali 1 Keg	1 Dok 1 Nota - 1 Keg
	Meningkatkan perlindungan di daerah rawan bencana	Tersedianya stok logistik dan peralatan penunjang tanggap darurat	- Jumlah kegiatan tanggap darurat - Jumlah TRC, fasilitas penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi - Jumlah aplikasi informasi kebencanaan kecamatan	30 Keg 1 Tahun 1 Kec	30 Keg 1 Tahun 1 Kec	30 Keg 1 Tahun 1 Kec	30 Keg 1 Tahun 1 Kec	30 Keg 1 Tahun 1 Kec
	Meningkatkan perlindungan di daerah rawan bencana	Terbangunnya fasilitas sarana-prasarana pendukung system penanggulangan bencana	- Jumlah dokumen kerusakan pasca bencana - Jumlah sarana prasana terdampak bencana - Jumlah pemulihan kerusakan perekonomian masyarakat	1 Keg 1 Keg 1 Keg	1 Keg 1 Keg 1 Keg	1 Keg 1 Keg 1 Keg	1 Keg 1 Keg 1 Keg	1 Keg 1 Keg 1 Keg

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk men capai tujuan dan sasaran , strategi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Kampar merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi, yang meliputi penetapan kebijakan dan program dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi.

Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya menetapkan arah dalam menentukan kegiatan-kegiatan dari program yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan internal diambil dalam rangka mengelola pelaksanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kebijakan internal ini telah dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Sementara kebijakan eksternal di tetapkan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana.

4.2.3 Strategi

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur dan melengkapi sarana prasarana dalam penanggulangan bencana
2. Menyusun, menyelaraskan, menjabarkan dan mengembangkan peraturan kebencanaan
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan dalam PRB dengan mengutamakan empowerment dan mendorong partisipasi masyarakat
4. Meningkatkan koordinasi antar institusi horizontal dan vertikal dalam melaksanakan pemulihan pasca bencana dengan menjalin kerja sama yang strategis yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan

4.3.2 Kebijakan

1. Mengembangkan kapasitas SDM berdasarkan kompetensi

2. Mengembangkan BPBD sebagai institusi terdepan dalam penanggulangan bencana
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana berdasarkan kebutuhan
4. Mengutamakan empowerment, mendorong partisipasi masyarakat dalam PRB
5. Menjalin kerjasama yang strategis, berkelanjutan dengan pemangku kepentingan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program BPBD Kabupaten Kampar merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan bagian dari program Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya menyangkut urusan perencanaan pembangunan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang akan memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi organisasi. Kegiatan yang disusun secara tahunan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi program dan kegiatan lokalitas yang merupakan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dan lintas SKPD. Oleh karena itu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis ini hanya mencakup program dan kegiatan yang pendanaannya dari APBD Kabupaten Kampar.

Penyusunan dan penetapan program dan indikasi kegiatan yang dikategorikan dalam rencana kerja yang akan dilaksanakan BPBD Kabupaten Kampar dalam periode 5 tahun mendatang (Tahun 2017 s/d 2022). Adapun secara garis besar program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

5.1 Bagian Sekretariat

a. Lokalitas SKPD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Penyediaan jasa tenaga harian lepas
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional
 - Jasa pengiriman/Penjeputan paket barang hibah/bantuan dari BNPB
 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - Pengadaan pakaian dinas harian
 - Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan
- d. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**
 - Kegiatan BinteK implementasi peraturan perundang-undangan
 - Kegiatan Orientasi pembinaan siaga bencana bagi aparatur
- e. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
 - Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Kegiatan Penyusunan pelaporan akhir tahun
- f. Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana**
 - Penyusunan Raperda Penanggulangan bencana
 - Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD_PB)
 - Pengembangan Studi-studi Bidang Kebencanaan
 - Penyusunan Disaster Manajemen Plan
 - Penyusunan Dokumen Bencana Kab. Kampar dalam Angka (BKDA)
 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan
 - Pengembangan Pusat Informasi Penanggulangan Bencana (PIPB)
 - Penyusunan rencana kontijensi
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - Orientasi pembinaan SDM BPBD
 - Penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana (RAD-PB)
 - Forum Pertemuan dalam Rangka Bulan PRB

- Forum pertemuan dalam rangka siaga bencana Karhutla
- Perencanaan strategis penanggulangan bencana daerah
- Fasilitasi dan koordinasi publikasi serta kehumasan bidang kebencanaan
- Pembuatan perda pencegahan dini dan penanggulangan bencana

h. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dan Kesiapsiagaan

- Peningkatan dan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) data kebencanaan
- Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
- Pelatihan Relawan Bencana Pada Desa-desa Rawan Bencana
- Penyuluhan budaya sadar bencana pada kecamatan rawan bencana
- Pembuatan peta monografi dan demografi daerah rawan bencana di kabupaten kampar
- Pembinaan Penyelenggaraan Tanggap Darurat
- Pembinaan Desa Tangguh Bencana
- Rapat koordinasi teknis penanggulangan bencana se Kab. Kampar
- Pengadaan Peralatan Sistem Peringatan Dini Pada Daerah Rawan Bencana
- Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
- Apel Relawan Siaga Bencana Kabupaten Kampar
- Penyelenggaraan Sekolah Sungai Daerah Rawan Bencana Banjir.
- Penyelenggaraan Sekolah Aman Bencana
- Upacara Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional
- Pengurangan resiko bencana dengan pengembangan kearifan lokal (local Wisdom)
- Koordinasi dan pengembangan corporate social responsibility (CSR) untuk reduksi Bencana
- Gladi Lapangan Penanggulan Bencana
- Operasional Piket Rutin Siaga Bencana Kabupaten Kampar

i. Program Bidang Kedaruratan dan logistik

- Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat

- Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDAL OPS-PB)
- Pengembangan Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR

j. Program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

- Pendataan, Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana
- Pemulihan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencerminkan tujuan dan sasaran menjadi suatu yang konkret dan dapat diukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian tujuan dan sasaran secara makro, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja.

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel VII.1

INDIKATOR KINERJA BPBD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Jumlah regulasi yang disusun	2 bh	4 bh	3 bh	2 bh	2 bh	2 bh	15 bh
2.	Jenis data yang dimiliki	1 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	9 jenis
3.	Jumlah masyarakat yang sudah menerima sosialisasi	20 org	200 org	200 org	150 org	100 org	100 org	770 org
4.	Jumlah peralatan yang dimiliki untuk penanggulangan bencana	10 %	25 %	35 %	50 %	75 %	90 %	100 %
5.	Prosentase Petugas penanggulangan bencana yang mempunyai skill	0 %	10 org	15 org	20 org	25 org	30 org	100 org
6.	Prosentase masyarakat yang menerima logistik bencana	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.	Prosentase masyarakat yang menerima bantuan perbaikan perumahan yang mengalami kerusakan	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Prosentase infrastruktur/ fasilitas terbangun	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9.	Tingkat kerusakan infrastruktur / fasilitas umum	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	100 %
10.	Jumlah kasus trauma heling	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
11.	Panjang jalan yang direhabilitasi dan di rekonstruksi	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
12.	Jumlah das rawan bencana yang direhabilitasi.	0 %	4 das	4 das	4 das	4 das	4 das	4 das

BAB VIII

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat di kemukakan kesimpulan dan harapan sebagai berikut :

6.1 Kesimpulan

Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar untuk Tahun 2017 s/d 2022 disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi negara dibidang penanggulangan bencana yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efesien, efektif serta tanggap terhadap keadaan dan lingkungan alam. Tujuan penyusunan rencana strategis adalah sebagai umpan balik (feedback) yang dapat digunakan sebagai manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

6.2 Harapan

Rencana Strategis merupakan proses berkelanjutan, artinya renstra perlu dikaji secara terus menerus dan berkesinambungan, maka harapan yang diambil atas penyusunan renstraini adalah :

1. Mengajukan penetapan secara formal terhadap renstra yang dimiliki BPBD Kabupaten Kampar.
2. Melakukan pengembangan perencanaan strategis sesuai dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis dan perencanaan strategis dilaksanakan dengan dukungan penuh dari BPBD Kabupaten Kampar.
3. Melakukan komunikasi tentang Visi dan Misi yang terencana dan sistematis keseluruhan pegawai, sehingga adanya komitmen seluruh Pegawai atas pelaksanaan tugas pokok dan lebih mengara pada Visi dan Misi yang telah

ditetapkan. Disamping itu, komunikasi juga perlu dilakukan kepada stakeholders (pengguna informasi), sehingga tercipta sistem umpan balik dalam penanggulangan bencana sehingga benar-benar bermanfaat pada pelaksanaan tugas.

Demikian rencana strategis ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai mana semestinya.

Bangkinang, Februari 2020

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR



TARMIZI, SE

Pembina Tk. I/NIP. 19660410 198703 1 004

Tabel VI. 3
MATRIX PROGRAM LIMA TAHUNAN

Kabupaten : Kabupaten Kampar
 Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Renstra Periode : 2012 – 2016

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Pengeluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikator Kegiatan		Pagu indikatif 5 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	Rp.	Sumber Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Bidang Tata Usaha	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik secara efisien. Terlaksananya pemasangan alat komunikasi RIG dan SSB Terlaksananya kegiatan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pengadaan peralatan kebersihan Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Terpenuhinya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Lancarnya urusan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik secara efisien Terciptanya lingkungan bersih dan nyaman Berfungsinya peralatan kerja secara baik. Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor Lancarnya pelaksanaan administrasi surat menyurat, perjalanan dan pelaporan Tersedia peralatan-peralatan kebutuhan kantor Dimiliki buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan kebencanaan Terpenuhinya pelayanan makan minum tamu dan pegawai	➤ Penyediaan Jasa surat menyurat ➤ Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik ➤ Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor ➤ Penyediaan jasa kebersihan kantor ➤ Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ➤ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ➤ Penyediaan alat tulis kantor ➤ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ➤ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ➤ penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan ➤ Penyediaan makanan dan minuman	PerMenDagri no 13 th 2006 PerMenDagri no 13 th 2006 PerMenDagri no 13 th 2006 PerMenDagri no 13 th 2006 PerMenDagri no 13 th 2006 PerMenDagri no 13 th 2006 PerMenDagri no 13 th 2006 PerMenDagri no 13 th 2006 PerMenDagri no 13 th 2006 PerMenDagri no 13 th 2006 PerMenDagri no 13 th 2006 PerMenDagri no 13 th 2006 PerMenDagri no 13 th 2006		APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD	Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar

			Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya perolehan informasi dan kemajuan kelembagaan hasil koordinasi dan konsultasi pegawai BPBD ke luar daerah	➤ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ➤ Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran ➤ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah ➤ Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas (THL)	PerMenDagri no 13 th 2006 PerMenDagri no 13 th 2006 PerMenDagri no 13 th 2006 PerMenDagri no 13 th 2006		APBD APBD APBD APBD	Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab.
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya proses pengiriman paket barang hibah dari BNPB	Terpenuhinya kebutuhan transportasi roda dua/roda empat, roda enam aparatur dalam penanggulangan bencana Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana gedung/kantor Terawatnya gedung /kantor dan fasilitasnya Terawatnya kendaraan dinas serta tersedianya kebutuhan spare part mobil dinas/operasional Diterimanya Paket paket barang hibah dari BNPB sampai ke gudang BPBD kampar	➤ Pemeliharaan rutin berkala gedung/kantor ➤ Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas/opersional ➤ Pengadaan kendaraan dinas operasional, roda dua, roda empat, dan roda enam ➤ Paket Pengiriman Barang hibah dari BNPB	PerMenDagri no 13 th 2006 PerMenDagri no 13 th 2006 PerMenDagri no 13 th 2006 UU No. 24 Th. 2007; PP No. 21,22,23; Permendagri No. 21 Thn 2008; Peraturan Kepala BNPB No.3 Th. 2008		APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD	Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya pelatihan teknis untuk aparatur meliputi administrasi, keuangan, pengadaan barang dan jasa. Terselenggaranya pelatihan teknis perhitungan Damage And Lossess Assessment (DaLA) dan Post Assessment (PDNA)	Meningkatnya jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, serta keterampilan teknis administrasi, pelaporan dan keuangan. Meningkatnya kemampuan teknis SAR dan trampilnya penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi. Meningkatnya pemahaman aparatur PB dalam	➤ Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan ➤ Bimbingan Teknis pengadaan barang dan jasa ➤ Bimbingan teknis tata kelola administrasi keuangan ➤ Bimbingan teknis pemadam kebakaran ➤ Pembinaan dan peningkatan fisik serta mental aparatur BPBD ➤ Pembinaan pengetahuan dan peningkatan fisik serta mental	PerMenDagri Nomor 13 Tahun 2006 PerMenDagri Nomor 13 Tahun 2006 PerMenDagri Nomor 13 Tahun 2006 PerMenDagri Nomor 13 Tahun 2006 PerMenDagri Nomor 13 Tahun 2006		APBD APBD APBD APBD APBD APBD	Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar

				penyusunan DaLA dan PDNA pasca bencana	- organisasi sosial pendukung aparat BPBD ➤ Orientasi pembinaan siaga bencana bagi aparat ➤ Bimtek Damkar	PerMenDagri Nomor 13 Tahun 2006 PerMenDagri Nomor 13			
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan keuangan akhir tahun. Keluaran Dokumen berupa cetakan laporan capaian kinerja.	➤ Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ➤ Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	PerMenDagri Nomor 13 Tahun 2006 PerMenDagri Nomor 13 Tahun 2006		APBD APBD APBD APBD	Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pegawai BPBD yang disiplin pegawai dalam berpakaian dinas	➤ Pengadaan pakaian kerja lapangan ➤ Pengadaan pakaian dinas harian ➤ Pengadaan Pakaian khusus Pemadam kebakaran	PerMenDagri Nomor 13 Tahun 2006 PerMenDagri Nomor 13 Tahun 2006		APBD APBD APBD	Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar
		Peningkatan Kemampuan Pengendalian Kebakaran hutan	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran	Jumlah relawan yang terlatih	Fasilitasi relawan siaga bencana			APBD	Kab. Kampar
		Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran	Terpenuhinya pembayaran jasa dan insentif pegawai pemadam kebakaran. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Meningkatnya kesejahteraan personil pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran selama 1 tahun	➤ Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ➤ Penyediaan jasa insentif Penanggulangan bencana dan Damkar ➤ Penyediaan dana jasa operasional TRC, TKC, dan Personil Pusdal Ops	PerMenDagri Nomor 13 Tahun 2006 UU No. 24 th. 2007; PP No. 21 Th. 28 ; Peraturan Kepala BNPB No. 3 Th. 2008; UU No. 7 Th. 2004 ttg SDA; UU No. 26Th. 2007		APBD APBD APBD	Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar
		Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan monitoring dan evaluasi kegiatan reabilitas dan rekonstruksi pasca bencana	Dimilikinya dokumen/laporan pekerjaan Meningkatnya Pemahaman masyarakat dalam penanganan darurat Tersedianya logistik bencana dan sarana peralatan PB sesuai kebutuhan	➤ Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana ➤ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ➤ Penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana (RAD-PB) ➤ Pengembangan studi-studi kebencanaan	UU No. 24 th. 2007; PP No. 21 Th. 28 ; Peraturan Kepala BNPB No. 3 Th. 2008; UU No. 7 Th. 2004 ttg SDA; UU No. 26Th. 2007		APBD APBD APBD	Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar

					➤ Forum Pertemuan dalam Rangka Bulan PRB ➤ Rakornis Internasional BNPB ➤ Pusat Pengendalian Operasional dalam Rangka Siaga Bencana KARHUTLA ➤ Perencanaan Strategis Penanggulangan Bencana Daerah				
		Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terlaksananya pendataan dan monitoring daerah pasca bencana Terlaksananya penyebaran informasi daerah/wilayah potensi bencana alam Terlaksananya Rehabilitasi & Rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana Terlaksananya kegiatan kapasitas tanggap darurat Terlaksananya latihan pembinaan penyelenggaraan tanggap darurat Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan kontinjensi Terlaksananya proses pembuatan Perda pencegahan dini Terselenggaranya pelatihan siaga bencana pada kecamatan rawan bencana Terlaksananya latihan pembinaan penyelenggaraan tanggap darurat	Dimilikinya dokumen tentang potensi bencana dan kebutuhan wilayah terpapar bencana (pasca bencana). Tersedianya sejumlah informasi/iklan bencana. Diterimanya sejumlah Informasi bencana sampai ke daerah-daerah rawan bencana dalam bentuk rambu-rambu dan baliho Berfungsinya sarana infrastruktur pasca bencana dan berkurangnya ancaman bencana Meningkatnya Jumlah korban dan wilayah yang teratasi pada masa tanggap darurat Meningkatnya jumlah relawan yang Terlatih untuk relawan tanggap darurat Dihasilkan beberapa dokumen perencanaan kontinjensi Terbitnya sejumlah Peraturan Daerah pencegahan dini dan	➤ Pemantauan dan Penyebar luasan Informasi potensi bencana alam ➤ Pemetaan daerah rawan bencana alam ➤ Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana dan prasarana Pasca Bencana ➤ Pengembangan Pusat informasi Penanggulangan Bencana ➤ Peningkatan kapasitas tanggap darurat ➤ Pendataan dan survei daerah pasca bencana ➤ Pengembangan Pusat Pengendalian dan operasi (PUSDALOPS) ➤ Pelatihan siaga bencana pada kecamatan rawan bencana ➤ Penyusunan Perencanaan Kontingen Bencana ➤ Penyusunan table Top Exercise (TTX) ➤ Gladi Lapangan Penanggulangan bencana ➤ Validasi peta rawan bencana ➤ Apel siaga dan gladi kesiapsiagaan ➤ Pembinaan dan pemantapan Desa Tangguh Bencana ➤ Apel siaga dan gladi kesiapsiagaan dalam rangka penanggulangan Bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan. ➤ Sosialisasi siaga bencana untuk siswa SMA, SMP.	UU No. 24 th. 2007; PP No. 21 Th. 28 ; Peraturan Kepala BNPB No. 3 Th. 2008; UU No. 7 Th. 2004 ttg SDA; UU No. 26Th. 2007 UU No. 24 Th. 2007; PP No. 21,22,23; Permendagri No. 21 Thn 2008; Peraturan Kepala BNPB No.3 Th. 2008 UU No. 24 th. 2007; PP No. 21 Th. 28 ; Peraturan Kepala BNPB No. 3 Th. 2008; UU No. 7 Th. 2004 ttg SDA; UU No. 26Th. 2007 UU No. 24 Th. 2007; PP No. 21,22,23; Permendagri No. 21 Thn 2008; Peraturan Kepala BNPB No.3 Th. 2008	APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD	Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar	

			Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi korban bencana, penangan pengungsi dan pemulihan sarana prasarana vital untuk aktifitas masyarakat Terletaknya Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan. Evakuasi dan Penanganan Pengungsi. Terlaksananya Fasilitas Simulasi Penanganan Darurat bagi Terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan monitoring dan evaluasi kegiatan reabilitasi dan rekontruksi pasca bencana Tersusunya pedoman rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	penanggulangan bencana Terlatihnya 1500 relawan bencana pada daerah/kecamatan rawan bencana Tersedia 100 orang relawan tanggap darurat Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana, penangan pengungsi dan pemulihan sarana prasarana vital untuk aktifitas masyarakat Meningkatnya kemampuan teknis SAR dan trampilnya penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi. Meningkatnya Pemahaman masyarakat dalam penanganan darurat Tersedianya logistik bencana dan sarana peralatan PB sesuai kebutuhan Meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan dan pembangunan yang lebih baik.					
		Peningkatan Program Pencegahan/Pengurangan Resiko bencana dan Kesiapsiagaan	Terselenggaranya rapat koordinasi teknis penanggulangan bencana antar Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha Terlaksananya koordinasi integerasi dan sinkronisasi program penyelenggaraan PB	Meningkatnya intensitas koordinasi antar lembaga, instansi, masyarakat dan dunia usaha Terkoordinasi, integerasi dan sinkronisasi program penyelenggaraan PB Terpublikasinya dan terbinanya hubungan	➤ Rapat Koordinasi teknis penanggulangan bencana.	UU No. 24 Th. 2007; PP No. 21,22,23; Permendagri No. 21 Thn 2008; Peraturan Kepala BNPB No.3 Th. 2008		APBD APBD APBD APBD	Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kampar

			Terlaksananya publikasi dan kehumasan bidang kebencanaan Tersedianya sistem informasi manajemen (SIM) data Kebencanaan	masyarakat bidang kebencanaan Terinformasinya data kebencanaan di jawa tengah						
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

Bangkinang, Februari 2020
KEPALA PELAKSANA BPBD KAB. KAMPAR



TARMIZI, SE
Pembina Tk. I/NIP. 19660410 198703 1 004

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	8
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah	14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	17
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	18
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi.....	21
3.4 Telaahan rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	21
3.5 Penentuan isu-isu strategis	23
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan.....	25
1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	26
1.3 Strategi dan Kebijakan	29
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Bagian Sekretariat	30
5.2 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	31
5.3 Bidang Kedaruratan dan Logistik	33
5.4 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	33

5.5 UPTB Pemadam Kebakaran	34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	37
5.2. Harapan	37

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Kondisi Personil BPBD Kabupaten Kampar Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016.....	8
Tabel. II.2	Kondisi Pegawai BPBD Kabupaten Kampar Menurut Pangkat/golongan Awal Tahun 2016.....	9
Tabel. II.3	Kondisi Pegawai BPBD Kabupaten Kampar Menurut Diklat Penjenjangan Februari 2016.....	10
Tabel. II.4	Kondisi Personil BPBD Kabupaten Kampar Menurut Pendidikan teknis Fungsional Pada Februari Tahun 2014.....	10
Tabel. II.5	Daftar Barang Inventaris / Perlengkapan BPBD Kabupaten Kampar.....	11
Tabel. II.6	Daftar Inventaris Barang / Perlengkapan UPT Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.....	13
Tabel. VI.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	28
Tabel. VI.2	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	36
Tabel. VI.1	Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif BPBD Kabupaten Kampar.....	39
Tabel. VI.3	Matrix Program Lima Tahunan.....	51